

Berobat tak Perlu Antre Mendaftar

▶ RSUD Segera Launching Sistem Online ▶ Rudi Minta Semua Pelayanan di Pemko

BATAM, TRIBUN -Wali Kota Batam, Muhammad Rudi memerintahkan agar instansi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam melaksanakan sistem elektronik dalam memberikan pelayanan. Seperti di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, kecamatan dan kelurahan harus sudah memberikan layanan secara online kepada masyarakat. Sehingga ke depan tidak ada lagi layanan manual kepada masyarakat.



TRIBUN/DOK

ANTRE DI RSUD- Sejumlah pasien yang mau berobat antre di RSUD. Dalam waktu dekat RSUD akan melaunching pelayanan sistem online dan pasien tak perlu lagi antre mendaftar.

iapkan. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu hadir untuk mendaftar dan tidak perlu antre. Tidak hanya dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat saja, untuk urusan internal Pemko Batam pun, Rudi mengharapkan agar antara sistem yang satu dengan yang lain saling terhubung.

"Ini harus kita mulai dari sekarang, sesuai dengan instruksi Pak Presiden. Bahkan Pak Presiden akan membuat regulasi baru menyangkut perizinan. Perubahan ini harus segera dilaksanakan," katanya.

Sementara Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam, Ani Dewiyana men-

● ke halaman 19



TRIBUN/IST

BERKUNJUNG KE JOGJA- Anggota 5 Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Bambang Purwanto dan Kasubdit Promosi, Ferdiana Sumiartony melakukan audiensi ke redaksi Tribun Jogja (group Tribun Batam) yang merupakan bagian dari

Siapkan

Respons

KNCI Protes

Aturan Kominfo

► Unjuk Rasa di DPRD Batam

► Minta 1 NIK 3 Nomor Dihapus

BATAM, TRIBUN - Aksi unjuk rasa Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI) Kepri diterima Komisi I DPRD Kota Batam dan Kadis Kominfo. Pertemuan digelar di ruang serbaguna Lantai I gedung DPRD Kota Batam

"Kami sangat mendukung apa yang diharapkan pemerintah. Tetapi kalau dibatasi kami tak bisa kerja. Sementara kami harus menjual stok kami. Kalau tak dijual kami rugi," ujar Junaidi dengan suara tinggi, Senin (2/4).

Pihak KNCI, Kinston mengatakan awalnya KNCI ini berdiri 1 September di Garut. Kemudian melakukan reformasi menjadi seperti saat ini bisa terjalin seluruh Indonesia. Tujuannya untuk menjalin kebersamaan mengurangi penipuan.

"Jadi tuntutan kami hanya meminta menghapus 1 NIK 3 nomor perdana. Kami minta kominfo menghapus aturan itu," tutur Kinston.

Pertemuan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi I Kota Batam, Harmidi Umar Husein dan Anggota Komisi I, Lik Khai, Kepala Dinas Kominfo, Salim, dan Kapolsek Batam Kota, Kopol Firdaus.

Salim mengatakan secara struktural tidak langsung dibawah Kementerian Kominfo. Ia mengatakan menerima aspirasi KNCI dan akan disampaikan ke dalam rapat.

"Jadi peraturan ini untuk menghindari penipuan. Kita juga tak bisa melakukan eksekusi karena keputusan bukan di tangan kita. Kami akan bahas ini terkait keinginan jangan dibatasi," papar Salim.

Ia menyebut semoga aspirasi tersebut sampai ke Kementerian Kominfo dan tuntutan tersebut segera ditindaklanjuti.

Warga menyebut jika kementerian memberikan peraturan harusnya diberikan solusi. Hal ini disampaikan oleh beberapa perwakilan KNCI

"Sebenarnya aturan registrasi ini akan membuat warga nyaman dan kami tak keberatan. Terkait aturan ini tidak adil, karena rata-rata tindakan kriminal itu dari selular. Bukan dari internet, tapi kenapa internet melalui kartu diblok. Seharusnya berikan solusi kepada para konter. Bukan diputus begitu saja. Itu merupakan hal yang tak adil," papar Junaidi.

Ia melanjutkan di Korea dan Jepang kartu internet tak harus registrasi tapi memang tak bisa menelepon. Sejak adanya registrasi, turis yang datang ke Batam juga menjadi sulit membeli kartu internet.

"Kalau datang ke konter kami ingin daftar harus melalui galery, jadi kalau beli malam, ke galeri mana. Setiap ada aturan harusnya pemerintah harus punya solusi. Kalau kami ditutup berarti wifi juga harus ditutup karena mereka tak menggunakan data NIK dan KK," katanya.

Sementara itu salah satu perwakilan KNCI, Lanjar mengatakan setiap handphone itu ada International Mobile Equipment Identity (IMEI), apabila ingin melakukan pelacakan bisa melalui nomor IMEI di handponenya. Tak hanya melalui nomor telpon selulernya.

"Tapi melalui IMEI. Kalau untuk pelacakan itu sangat mudah sekali dan bermanfaat untuk semua. Tak merugikan outlet internasional seperti ini," tegasnya. (rus)



UNJUK RAS
Kota Batam, S
(NIK) untuk tig

Tak Ada Pembatasan Kartu

SEBENARNYA tak ada batasan 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Keluarga (KK) hanya bisa sebanyak 3 nomor. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Batam Salim.

"Peraturan Kominfo nomor 21 tahun 2017 bahwa memang dibatasi untuk mendaftar sendiri yaitu baik untuk data maupun menelepon. Harus maksimal 3 kartu saja. Sementara nomor keempat boleh, tetapi harus langsung keoperator yang bersangkutan," kata Salim kepada *Tribun*, Senin (2/4).

Ia melanjutkan yang menjadi keberatan pihak KNCI ini sebenarnya karena mereka tak dilibatkan atau tak diberikan kewenangan dalam hal pendaftaran yang keempat. Dan mereka ingin diberikan hak untuk pendaftaran tersebut. Itu saja sebenarnya.

Yang paling penting, Kesatuan Niaga Seluler

Indonesia (KNCI) Kepri memberikan rekomendasi kepada kementerian perihal pembatasan bagi orang perorangan memiliki kartu seluler. Tetap dibatasan 3 hingga saat ini.

"Kalau dilihat lagi gak ada pembatasan sebenarnya. Tapi kalau mau lebih dari 3 silahkan langsung ke operatornya masing-masing. Misalnya telkomsel, indosat, XL, dan lainnya," ucap Salim mengulangi.

Salim mengatakan mereka secara resmi melakukan kegiatan ini harus ada dasar hukumnya. Ini adalah peraturan menteri yang menjadi keputusan pusat.

"Saya bukan mengatasnamakan pemerintahan daerah, karena secara struktural bukan menjadi bawahan Kominfo. Kalau di daerah paling koordinasi saja. Untuk solusinya kita akan mengakomodir masukkan mereka ke pusat secepat mungkin," tegasnya. **(rus)**

Pemohon Bisa Pantau Perizinan

► Presiden akan Resmikan Mal Pelayanan Publik

BATAM, TRIBUN - Setelah lama ditunggu, rencananya Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam akan diresmikan April ini. Orang nomor satu di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo rencananya akan hadir pada peresmian tersebut.

Wali Kota Batam, Rudi mengakui, pihaknya sudah mendapat informasi terkait peresmian MPP. Namun secara resmi, pihaknya belum mendapatkan surat.

"Jadi saya belum bisa berkomentar banyak soal itu," kata Rudi, Senin (2/4).

Meski begitu, ia tetap meminta kepada pegawainya di Pemerintah Kota Batam untuk melakukan persiapan terkait peresmian tersebut. Persiapan ini di antaranya, agar seluruh pelayanan pemerintah menggunakan sistem elektronik.

"Nanti semuanya harus pakai online (daring). Kemudian terintegrasi antar layanan satu dengan lainnya," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal (DPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam, Gustian Riau mengatakan, informasi peresmian MPP sudah ia terima.

"Itu disampaikan saat arahan Presiden di pertemuan wali kota atau bupati kemarin," kata Gustian.

Meski begitu, Gustian mengaku belum tahu tanggal pasti peresmian tersebut. Untuk peresmian, diakuinya sudah jauh-jauh hari pihaknya melakukan persiapan berkoordinasi dengan instansi lainnya, yang ada di MPP.

"Dalam waktu dekat ini kita akan adakan pertemuan lagi," ujarnya.

Soal integrasi antar layanan yang ada di MPP, Gustian mengatakan integrasi sudah mulai berjalan. *Tinggal nanti lebih lanjutnya, meminta data konektivitas antarinstansi.*

"Jadi nanti masyarakat cukup satu kali memasukkan berkas saja, di awal. Kalau ada dokumen perizinan yang syaratnya sama," kata Gustian.

Sementara Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Ady Soegiarto mengakui, banyak manfaat nyata yang bisa dirasakan masyarakat, jika sistem online dalam pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) sudah diterapkan. Dalam hal ini, menurut Ady, integrasi medianya sebagai data sharing, bernama Online Single Submission (OSS). **(wie)**

20 Titik Baru akan Dipasang CCTV

► Prioritas Lokasi Rawan dan Persimpangan

BATAM, TRIBUN - Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, Pemerintah Kota (Pemko) Batam berencana menambah fasilitas CCTV di 20 titik baru. Tujuannya untuk melengkapi 36 CCTV yang ada sebelumnya.

Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Salim mengatakan 20 titik CCTV ini nantinya akan difokuskan di lokasi-lokasi persimpangan jalan, daerah keramaian, serta daerah yang rawan melakukan tindakan kejahatan.

Dan nantinya pemantauan CCTV ini dikendalikan tenaga operasional di bidang informasi teknologi.

“Sudah diusulkan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Fokus kita memang dilakukan di mainland dan pusat kota. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan ke DPRD Kota



Salim

Batam,” kata Salim kepada Tribun, di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (2/4).

Mengangkut jumlah anggarannya, Salim belum bisa memberikan informasi banyak kepada wartawan, mengingat masih ada pembahasan di

internal terkait pengadaan, biaya perawatan pemeliharaan serta sewa link CCTV.

“Untuk jumlah pasti angkanya nanti akan kita sampaikan,” jelasnya.

Hingga saat ini Pemko Batam memiliki 36 kamera CCTV di 20 titik yang tersebar di Batam. Mengingat pengadaan kamera CCTV baru dianggarkan sejak 2017 lalu.

Sementara di 2018 dilakukan penundaan karena ada rasionalisasi anggaran. Program ini kemudian diusulkan lagi di 2019 dengan melihat kebutuhan Kota Batam dan sekaligus meminimalisir tindak kejahatan yang marak terjadi. **(rus)**

Siapkan Genset Antisipasi Listrik Padam

▶ 305 Siswa SMKN 4 Ikut Ujian Berbasis Komputer

BATAM, TRIBUN - Hari pertama Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang serentak dilaksanakan di seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berjalan lancar dan sesuai jadwal yang ditentukan.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Kepri, Muhammad Dali saat mengunjungi SMKN 4 Batam menyebut semua berjalan lancar.

"Alhamdulillah informasi hari ini untuk Ujian Nasional SMK di Kepri, baik jadwal maupun soal untuk pelaksanaan UNKP dan UNBK berjalan lancar dan tidak ada kendala," katanya, Senin (2/4).

Ditengah kunjungannya pada pagi hari di SMKN 4

Batam, memantau segala aktivitas para siswa ke ruangan sekolah apakah ada kendala atau tidak pada saat pelaksanaan UNBK. Saat dipantau masih aman dan tidak ada kendala, baik soal maupun hal lainnya.

Ia juga mengunjungi sekolah SMK lainya yang ada di Batam seperti SMKN 1, SMK 5 dan lainnya. "Habis dari SMKN 4 Batam ini, saya lanjut memantau di sekolah SMKN 1 Batam," jelasnya.

"Kita sudah menyurati PLN dan jaringan kita. Mudah-mudahan tidak ada kendala selama empat hari pelaksanaan UNBK yang diadakan beberapa sekolah SMK yang ada di Kepri," jelasnya.

Pantuan Tribun di SMK N

4 Batam, di tengah siswa melaksanakan UNBK sesi pertama yang dimulai pukul 07.30 WIB berjalan lancar dan tidak ada kendala. Pelaksanaan UNBK ini berlangsung selama empat hari hingga Kamis (5/4).

Kepala Sekolah SMA N 4 Batam, Ahmad Tahir mengatakan, seluruh siswa XII berjumlah 305 orang mengikuti UNBK dengan menggunakan sistem komputerisasi. Pelaksanaan UNBK menggunakan sistem komputerisasi ini sudah berlangsung semenjak tiga tahun lalu.

"Ada sebanyak 305 siswa kelas XII mengikuti ujian yakni Kimia Industri, Kimia Analis, Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia," ujarnya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kendala sistem jaringan atau masalah pada komputer, pihaknya juga sudah menyediakan tiga teknisi dan tiga proyektor untuk mengantisipasi masalah tersebut, sehingga ketika ada kendala tidak mengganggu siswa dalam melaksanakan ujian.

"Keempat mata pelajaran yang diujikan ini dilaksanakan siswa selama empat hari," jelasnya.

Dia menyampaikan, pada pelaksanaan ujian nasional saat ini, pengawas yang datang dari luar sekolah dan pengawas yang datang ini langsung ditunjuk dari Dinas Pendidikan Provinsi. (als)

Rudi Ancam

Nonjobkan

84 Pejabat

- ▶ Tak Serahkan Laporan Kekayaan
- ▶ Berharap tak Ada Tertangkap KPK

BATAM, TRIBUN - Sebanyak 84 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam terancam akan dinonjobkan. Pasalnya hingga batas waktu yang ditentukan, 31 Maret lalu, mereka belum juga menyerahkan laporan harta kekayaannya.

"Kalau tidak melaporkan harta kekayaan, kami akan ambil tindakan. Akan saya nonjobkan," kata Wali Kota Batam, Rudi, Senin (2/4).

Meski begitu, kepada mereka masih diberi kesempatan untuk melapor.

"Laporan kita ini ditunggu KPK. Besok saya tunggu laporannya," ujarnya.

Rudi mengingatkan, laporan kekayaan ini penting agar pejabat berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Pejabat di lingkungan Pemko Batam, juga diminta tidak bermain-main dengan anggaran. Ia tidak ingin ada pejabat di Pemko yang terjaring KPK.

"KPK sekarang beda dengan sebelumnya. Jangan kan Rp 1 miliar, yang Rp 20 juta juga diambil (ditang-



Kalau tidak melaporkan harta kekayaan, kami akan ambil tindakan. Akan saya nonjobkan

RUDI

Wali Kota Batam

kap)," kata Rudi.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengingatkan, batas akhir pengisian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) sudah semakin dekat. Sebanyak 264 orang pejabat Pemko Batam, diketahui belum mengisi LHKPN-nya. Sementara 669 orang sudah mengisi daftar harta kekayaannya.

"E-filling dari KPK mem-

perlihatkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara atau yang wajib lapor LHKPN sebesar 72 persen," kata Amsakar sebagaimana dikutip dalam humas.batam.go.id, Rabu (28/3).

Kepada pejabat yang belum lapor, Amsakar meminta untuk segera melapor sebelum 31 Maret 2018. Adapun pejabat yang wajib mengisi LHKPN ini, yaitu seluruh eselon II dan eselon III. Kemudian eselon IV yang bersentuhan dengan kegiatan, serta pegawai yang ditugaskan menjadi bendahara.

Amsakar mengatakan, sebelum ini Pemko Batam sudah mendapat asistensi dari tim koordinasi, supervisi, pencegahan (korsupgah) KPK. Jangan sampai pejabat yang sudah mendapat supervisi ini malah tidak melaksanakan kewajibannya melapor harta kekayaan.

"Yang merasa punya kegiatan, punya proyek, lapor. Eselon II dan Eselon III seluruhnya wajib," ujarnya. (* /
wie)